

PRESS RELEASE

**SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HUT KE-31 BPKP
"PUBLIC ENTREPRENEURSHIP DI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG BEBAS DARI
FRAUD"**

**Selasa, 20 Mei 2014, pk 08.00 -12.00 WIB
Aula Gandhi, Lantai 2 BPKP Pusat**

Saat ini fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat, BPKP, dan APIP lain) belum secara signifikan menyentuh ke substansi pelayanan publik. Untuk itulah Seminar Nasional BPKP bertajuk "*Public Entrepreneurship* di Pemerintahan Pusat dan Daerah yang Bebas dari *Fraud*" ini dilaksanakan dengan menghadirkan eksekutif terkemuka, akademisi, dan tokoh birokrat sebagai narasumber. Pada seminar ini, diundang sebagai peserta adalah Anggota Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), birokrat/praktisi di kementerian/lembaga, akademisi, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Setelah hampir tiga tahun berdiri, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) yang diprakarsai oleh BPKP, Polri, dan Kejaksaan Agung, kini kita telah memiliki asosiasi profesi sebagai wadah berhimpunnya para auditor forensik di Indonesia, yaitu **Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)**. Saat ini, AAFI telah memiliki anggota sekitar 240 auditor forensik bersertifikat CFrA. Sebagian besar (80%) merupakan auditor BPKP, dan selebihnya (20%) merupakan auditor dari Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah, BUMN, universitas, dan swasta.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, wadah profesi ini diharapkan mengedepankan profesionalisme, sehingga AAFI dapat menjadi organisasi yang terpercaya, tangguh, dan handal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pentingnya pembentukan auditor forensik bersertifikat, sejalan dengan semakin berkembang dan semakin canggihnya upaya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kaum terpelajar (*white-collar crime*), baik di kalangan pemerintahan maupun swasta. Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan auditor forensik yang memahami upaya pencegahan dan penanganan kejahatan korupsi yang memanfaatkan teknologi informasi ini.

Seminar ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta, yang terdiri atas 100 auditor forensik bersertifikat (CFrA), 37 birokrat dan praktisi, 20 akademisi, 20 aparat penegak hukum (APH), 34 auditor APIP, dan 89 orang internal BPKP, baik pejabat struktural maupun fungsional auditor.

Pembicara pertama, Mas Achmad Daniri, seorang eksekutif terkemuka di industri pasar modal karena keberhasilannya membangun fondasi Bursa Efek Indonesia akan berbicara mengenai konsep dan prinsip kebijakan public yang mendorong *public entrepreneurship* dan

risikonya di Indonesia. Selanjutnya seorang akademisi, Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., akan mengupas topik *fraud* terkait kebijakan publik dan advokasi terkait risiko terjadi penyimpangan dalam perumusan dan penerapan kebijakan publik Terakhir, Wakil Jaksa Agung Dr Andi Nirwanto akan membahas penegakan hukum dalam bidang kebijakan publik.

Melalui seminar nasional ini, diharapkan BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat mengoptimalkan perannya dalam pengawasan fungsional yang menyentuh area pelayanan publik.

Bagian Humas dan HAL BPKP

Jl.Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Tel/Fax: 62218584985

www.bpkp.go.id, humas@bpkp.go.id

CP: Yan Eka Milleza, 081340797489

Harry Bowo, 08159918047